

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel melalui Desentralisasi Fiskal

Fidhia Yuningtiyas

Universitas Islam Malang, Fidhiapid05@gmail.com

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal memberikan kekuatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka sendiri guna mendukung pembangunan dan layanan publik. Namun, masih ada sedikit penelitian yang mengintegrasikan manajemen keuangan daerah dari perspektif desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer yang tepat, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penguatan transparansi serta pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Studi ini berkontribusi untuk memperkuat pemahaman tentang hubungan antara kemandirian fiskal dan akuntabilitas publik dalam tata kelola keuangan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pembangunan kapasitas kelembagaan, digitalisasi manajemen keuangan, dan peningkatan partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kata kunci: *desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas publik, kemandirian fiskal*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal adalah alat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah (Shah, 2016; Yushkov, 2015; Zulfan et al., 2020). Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing (Akita et al., 2021). Kewenangan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor krusial dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Menurut pandangan teori desentralisasi fiskal, penyerahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya, mengingat pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Oates (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap preferensi lokal, sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dengan cara yang transparan, efisien, dan akuntabel (Audyta et al., 2021; Treisman, 2015). Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada besarnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Hummel & Kusumasari, 2025).

Di sisi lain, paradigma tata kelola yang baik menekankan pentingnya akuntabilitas publik sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas harus tercermin tidak hanya dalam kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi

juga dalam kemampuan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah perlu difokuskan pada pencapaian prinsip *value for money* yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Bastian, 2019b; Halim & Kusufi, 2017).

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan serta lemahnya sistem pengawasan internal (Masdiantini & Rasmini, 2018). Banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya terwujud (Akita et al., 2021). Selain itu, hubungan antara desentralisasi fiskal dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa peningkatan kewenangan fiskal belum selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan di seluruh daerah (Astriana & Khoirunurrofik, 2024).

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek regulatif, tetapi juga menyangkut kapasitas fiskal, tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme akuntabilitas publik (Muhtar, 2022). Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, kajian mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik menjadi semakin penting untuk dilakukan. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif bukan sekadar alat administrasi anggaran, melainkan juga merupakan cara untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan fokus pada kepentingan masyarakat (Mudhofar & Tahar, 2016; Saputra & Setiawan, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pertanyaan: bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan dalam perspektif desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur untuk menganalisis pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari sudut pandang desentralisasi fiskal dan akuntabilitas publik. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, dan regulasi yang relevan dengan topik pengelolaan keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan akuntabilitas publik. Literatur dipilih dengan mempertimbangkan beberapa kriteria membahas pengelolaan keuangan daerah, desentralisasi fiskal, atau akuntabilitas publik, tersedia dalam bentuk teks lengkap dan diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025. Dari hasil penelusuran awal, dilakukan seleksi berdasarkan judul, abstrak, dan isi artikel sehingga diperoleh sumber yang relevan untuk dianalisis. Unit analisis penelitian mencakup aspek kemandirian fiskal daerah, pengelolaan dana transfer, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik analisis konten melalui langkah-langkah identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis temuan dari berbagai sumber. Untuk meningkatkan keandalan temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan referensi akademik lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal

Hasil sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menghasilkan dua kecenderungan utama. Di satu sisi, pelimpahan kewenangan fiskal telah memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas fiskal antar daerah, sehingga manfaat dari desentralisasi belum dirasakan secara merata (Akita et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan yang signifikan dari banyak pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merumuskan program pembangunan, sementara wilayah dengan pendapatan rendah lebih bergantung pada kebijakan transfer fiskal nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mencapai kemandirian keuangan daerah sesuai dengan tujuan awal otonomi daerah. Sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dari pemerintah daerah (Treisman, 2015). Wilayah yang memiliki sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang baik cenderung lebih efektif dalam mengelola sumber daya fiskal dibandingkan dengan wilayah yang kapasitas birokrasi dan tata kelolanya masih lemah (Astria & Khoirunurrofik, 2024).

2. Optimalisasi PAD sebagai Faktor Penentu Kemandirian Fiskal

Temuan utama kedua menunjukkan bahwa PAD adalah indikator yang paling krusial dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Hampir seluruh literatur yang diteliti menunjukkan adanya hubungan yang menguntungkan antara peningkatan PAD dan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai program pembangunan serta pelayanan publik (Muhtar, 2022). Namun demikian, peningkatan PAD tidak selalu menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang berkualitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah sering kali masih bergantung pada sektor-sektor konvensional, sementara inovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal belum berkembang secara optimal (Halim & Kusufi, 2017). Akibatnya, struktur penerimaan daerah menjadi mudah terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

Penerapan digitalisasi pada administrasi perpajakan daerah merupakan salah satu strategi yang sering diusulkan dalam berbagai literatur. Penerapan sistem pembayaran elektronik, pengintegrasian basis data wajib pajak, dan digitalisasi retribusi telah terbukti meningkatkan efektivitas pemungutan dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan (Bastian, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya bergantung pada perluasan objek pajak, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem administrasi yang transparan dan efisien.

3. Dana Perimbangan dan Pemerataan Fiskal

Hasil kajian literatur menunjukkan adanya paradoks dalam pengelolaan dana perimbangan. Secara normatif, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk mengatasi perbedaan fiskal antarwilayah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya dana perimbangan telah memberikan dukungan kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi, sejumlah studi juga mengidentifikasi dampak yang kurang menguntungkan berupa munculnya fenomena ketergantungan fiskal. Ketika sebagian besar kebutuhan belanja daerah dipenuhi melalui

transfer pusat, motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi cenderung rendah. Kondisi ini mengakibatkan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mendorong kemandirian daerah, melainkan menciptakan hubungan ketergantungan baru terhadap pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas dana perimbangan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah alokasi yang diterima oleh daerah. Yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan transfer tersebut untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri.

4. Efektivitas Belanja Daerah dan Permasalahan Struktur APBD

Pola penting lain yang ditemukan dalam literatur adalah masih dominannya belanja operasional, khususnya belanja pegawai, dalam struktur APBD di berbagai daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan dalam kapasitas fiskal, hal tersebut belum tentu diimbangi dengan perbaikan dalam kualitas belanja publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan proporsi belanja modal yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik (Zulfan et al., 2020). Sebaliknya, penguasaan pengeluaran sehari-hari mengakibatkan ruang anggaran untuk pengembangan semakin menyempit. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan seberapa efektif alokasi belanja dilakukan.

Dari sudut pandang administrasi publik, situasi ini mencerminkan adanya dominasi yang signifikan terhadap pendekatan birokratis dalam proses penganggaran daerah. Padahal, paradigma manajemen publik baru dan tata kelola yang baik menekankan pentingnya penganggaran berbasis kinerja yang mengaitkan penggunaan anggaran dengan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi penganggaran harus difokuskan pada penguatan prinsip *value for money* sehingga setiap pengeluaran publik dapat memberikan manfaat yang maksimal (Bastian, 2019).

5. Digitalisasi Keuangan Daerah dan Penguatan Akuntabilitas Publik

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu faktor yang semakin berpengaruh terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), *e-budgeting*, *e-procurement*, dan berbagai platform digital lainnya telah membawa dampak yang signifikan terhadap transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Digitalisasi memungkinkan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga mengurangi peluang manipulasi data dan penyimpangan anggaran. Selain itu, akses informasi yang lebih terbuka memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi. Kualitas sumber daya manusia, kesiapan organisasi, dan komitmen pimpinan daerah adalah faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam menerapkan sistem digital. Dengan kata lain, digitalisasi perlu dipahami sebagai elemen penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan, bukan hanya sebagai upaya untuk memodernisasi perangkat teknologi.

6. Akuntabilitas Publik sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Desentralisasi Fiskal

Temuan penting lainnya adalah bahwa akuntabilitas publik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan semua aspek dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja fiskal yang lebih baik serta memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Akuntabilitas kini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk

menyampaikan laporan keuangan, melainkan juga mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam menjelaskan sejauh mana penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian hasil pembangunan yang dihasilkan (Sari & Putra, 2021). Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran merupakan elemen krusial untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Keterlibatan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan pemanfaatan kanal digital pengaduan publik dapat memperkuat pengawasan sosial terhadap penggunaan sumber daya publik.

7. Implikasi Kebijakan dan Kontribusi Ilmiah

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kapasitas PAD, efektivitas pemanfaatan dana perimbangan, kualitas alokasi belanja daerah, dan tingkat akuntabilitas publik. Keempat faktor tersebut saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penyusunan kerangka sintesis yang menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan keuangan daerah di Indonesia bukan hanya keterbatasan sumber daya fiskal, tetapi juga ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, dan mekanisme akuntabilitas publik. Temuan ini memperdalam pemahaman bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan didukung oleh institusi yang akuntabel, sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dan orientasi belanja yang berfokus pada hasil pembangunan.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan daerah adalah elemen krusial yang mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh pelimpahan kewenangan kepada daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola dana transfer secara efektif, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Semakin meningkat kemampuan daerah dalam aspek tersebut, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik yang dapat dicapai. Implikasi praktis dari penelitian ini menyoroti betapa pentingnya memperkuat strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan penggunaan dana transfer, serta mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Studi ini memiliki batasan pada pendekatan literatur, sehingga belum dilakukan pengujian terhadap kondisi empiris di lokasi tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memanfaatkan data empiris dalam menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era. *Regional Science Policy & Practice*, 13(5), 1292–1310. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Astriana, S., & Khoirunurrofik. (2024). Fiscal decentralization and governance performance: Empirical evidence from the district city level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS

DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>

Bastian, I. (2019a). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (3rd ed.). Erlangga.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi keuangan daerah* (5th ed.). Salemba Empat.

Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local government financial performance and decentralization in Indonesia. *American Review of Public Administration*. <https://doi.org/10.1177/0160323X251364379>

Masdiantini, P. R., & Rasmini, N. K. (2018). Fiscal decentralization, internal control system, accountability of local government and audit opinion. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 123–132. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p06>

Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Efek moderasi dari kinerja. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>

Muhtar. (2022). Local expenditures, local wealth, financial management accountability, and local government administration performance: Empirical studies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 89–102. <https://doi.org/10.26905/ap.v8i1.8325>

Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal decentralization, accountability and corruption indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>

Sari, N. M. D. P., & Putra, I. N. W. A. (2021). The effect of regional financial performance on public accountability in local governments. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(5), 1–10.

Shah, A. (2016). Fiscal decentralization and accountable governance. *Asian Economic Policy Review*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/aepr.12131>

Treisman, D. (2015). Decentralization and accountability. In *Handbook of Multilevel Finance*. Edward Elgar Publishing.

Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404–418. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>

Zulfan, T., Abdullah, S., & Saputra, M. (2020). Fiscal decentralization and public service performance in Indonesian local governments. *Public Policy and Administration*, 19(3), 311–325.